



► HASIL AUDIT BPK

Pemerintah Kota Yogyakarta Sukses Meraih Enam Kali WTP



M. Noor Korompot
Wakil Pemimpin Perusahaan
Harian Jogja

Tidak banyak provinsi, kabupaten atau kota yang mampu mempertahankan hasil kinerja keuangannya dengan baik. Namun Pemerintah Kota Yogyakarta membuktikan mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali berturut-turut versi lembaga auditor negara (BPK).

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik. Dan jika ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan. Hal tersebut dalam enam tahun terakhir mampu dipertahankan. Sehingga wajarlah jika kita memberikan apresiasi yang positif kepada pemerintah kota.

Keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertahankan kinerja pelaporan keuangan secara baik dan benar ini juga tidak lepas dari keberhasilan jajaran aparaturnya di bawah kepemimpinan Walikota Haryadi Suyuti. Di bawah kepemimpinan beliau, predikat sebagai daerah yang mampu memberikan pelaporan keuangan dengan baik sesuai dengan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK serta UU terkait lainnya tetap melekat hingga saat ini.

Pemeriksaan BPK meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemkot, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai

atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15B/LHP/XVIIIY00/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 dan Nomor 15C/LHP/XVIIIYOG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Aset Rp7,9 Triliun

BPK telah memeriksa neraca pemerintah Kota Yogyakarta per 31 Desember 2014 dan 2013. Pemeriksaan itu meliputi realisasi anggaran dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta, sementara tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Dalam laporan BPK disebutkan aset Pemkot tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.7.930.364.020,19 dan Rp.260.466.028.804,93. Aset lain-lain yang disajikan salah satunya adalah aset tetap hasil sensus barang daerah tahun 2013 yang tidak ditemukan fisiknya dan belum diproses lebih lanjut sebesar Rp4.193.251.250,47.

Catatan lain laporan keuangan yang memperkuat daerah ini meraih WTP karena dilihat dari

pendapatan tahun 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp1.459.742.435.083,81 dan Rp1.309.580.194.014,42. Angka pendapatan yang disajikan belum termasuk pendapatan Edotel, Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Grha Bina Harapan sebesar Rp 1.796.021.578,00.

Pendapatan yang diperoleh dari Edotel, Rusunawa Cokrodirjan dan Rusunawa Graha Bina Harapan digunakan langsung untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing unit tanpa melalui mekanisme APBD. Selain itu, Pemkot memiliki tanah seluas 58.850 m² yang dikerjasamakan dengan mitra pihak ketiga (PT PK) dengan bentuk kerja sama bangun guna serah (Build Operate and Transfer/BOT).

Aset tanah tersebut saat ini dijamin oleh PT PK ke Bank. Kerja sama BOT tersebut telah diputus secara sepihak kontraknya oleh Pemkot pada tanggal 10 Maret 2009.

Dalam laporan BPK juga disebutkan Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi gugatan perdata dari PT PK atas pemutusan kontrak secara sepihak tersebut. Keputusan Pengadilan Negeri memenangkan pihak penggugat. Atas putusan tersebut Pemkot keberatan dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan banding Pemerintah Kota Yogyakarta, dan atas putusan tersebut, PT PK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas proses kasasi PT PK tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan oleh PT PK. Atas putusan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun sampai saat ini belum ada putusan hukum lebih lanjut.

Selamat kepada pemerintah Kota Yogyakarta yang meraih predikat WTP selama enam tahun berturut-turut, semoga prestasi ini akan terus berlanjut.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005